

Peranan Dinas Pendidikan Dalam Pengawasan Program Makanan Bergizi Gratis Di Sekolah Dasar Negeri Kota Pematang Siantar

Selvi Elvrida Samosir*¹ Maringan Panjaitan² Jonson Rajagukguk³

^{1,2,3} Administrasi Publik, FISIPOL, Universitas HKBP Nommensen, Indonesia
selvi.elvrida@student.uhn.ac.id¹ maringan.panjaitan@uhn.ac.id² jonson.rajagukguk@uhn.ac.id³

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta mengungkap berbagai masalah penelitian yaitu, bagaimana Peranan Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan Makanan Bergizi Gratis di pematang siantar dan sudah sejauh mana penyaluran MBG di sekolah yang ada di Pematang Siantar. beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan sumber informasi dari informan yang dianggap relevan seperti kepala dinas pendidikan, anak sekolah sebagai sasaran MBG dan masyarakat sebagai pelaksana dan orang tua Murid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Makanan Bergizi Gratis telah dilaksanakan sejak awal tahun 2025. Faktor pendukungnya adalah 1) kebijakan pemerintah, 2) kebijakan satuan Pendidikan, Faktor penghambat antara lain, keterlambatan distribusi makanan dari dapur penyedia makanan menuju sekolah, serta keterbatasan fasilitas pendukung di sekolah seperti tempat penyimpanan makanan dan alat makan bagi siswa. Pelaksanaan program MBG di Kota Pematangsiantar juga masih belum merata karena belum seluruh sekolah dapat menerima manfaat dari program tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang telah beroperasi serta proses pembangunan fasilitas pendukung yang masih berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian, maka rekomendasi yang diberikan bahwa Dinas Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah penerima manfaat. Pihak sekolah diharapkan dapat terus mendukung pelaksanaan program MBG dengan mengelola proses pembagian makanan secara tertib dan terorganisir. Penyedia makanan diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu dalam proses pendistribusian makanan ke sekolah serta memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada siswa telah memenuhi standar gizi dan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Makanan Bergizi Gratis; pengawasan; implementasi kebijakan

Abstract

The purpose of this paper is to identify, describe, and uncover various research issues, namely the role of the Education Office in overseeing the Free Nutritious Meal Program in Pematang Siantar and the extent of MBG distribution in schools in Pematang Siantar, along with supporting and inhibiting factors. The method used is a qualitative approach, with information sources from relevant informants such as the head of the education office, school children as the target of the MBG, the community as the implementers, and parents of students. The results indicate that the implementation of the Free Nutritious Meal Policy has been in effect since early 2025. Supporting factors include 1) government policy, 2) education unit policy. Inhibiting factors include delays in food distribution from food pantries to schools, and limited supporting facilities in schools, such as food storage and cutlery for students. The implementation of the MBG program in Pematang Siantar City is also still uneven, as not all schools have benefited from the program. This is due to the limited number of operational food pantries or Nutrition Fulfillment Service Units, as well as the ongoing construction of supporting facilities. Based on the research results, the recommendation is that the Education Office improve coordination and oversight of the MBG program's implementation in beneficiary schools. Schools are expected to continue supporting the MBG program by managing the food distribution process in an orderly and organized manner. Food providers are expected to improve the timeliness of food distribution to schools and ensure that the food provided to students meets nutritional and food safety standards in accordance with established regulations.

Keywords: Free Nutritious Meals; supervision; policy implementation

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu bangsa. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang pada gilirannya menjadi modal utama dalam meningkatkan daya saing bangsa. Jenjang pendidikan dasar, khususnya sekolah dasar, menjadi pondasi awal dalam membentuk kompetensi akademik, keterampilan hidup, serta karakter peserta didik. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan dasar harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, kewenangan penyelenggaraan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pendidikan dasar, termasuk pembinaan sekolah dasar.

Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi memulai Program Makan Bergizi Gratos (MBG) tahun 2025. Pelaksanaan program dilaksanakan Senin, 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Pemerintah menargetkan pemberian Makan Bergizi Gratis untuk 15 hingga 20 juta penerima manfaat tahun ini, mulai dari peserta didik jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (Harsono, 2025).

Dinas Pendidikan merupakan salah satu institusi pemerintahan yang khusus mengurus masalah Pendidikan di Indonesia. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat bertentangan dengan pendidikan, dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Zulrahman, n.d.).

Realisasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pematangsiantar, hanya mampu melayani 2.802 siswa SD dan SMP. Sisanya jauh lebih besar, belum menikmati program Presiden RI tersebut. Untuk memenuhi makanan bergizi 2.802 siswa (penerima manfaat), disebut, masih dilayani satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi.

Data dari Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan tingginya tingkat anak tidak sekolah serta rendahnya capaian nutrisi pada kelompok rentan, seperti anak usia sekolah, balita, dan ibu hamil. Masalah ini menegaskan perlunya intervensi yang tidak sektoral dan terfragmentasi, melainkan berbasis pendekatan holistik yang mengintegrasikan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial secara simultan. MBG hadir sebagai solusi intersektoral yang menjawab tantangan tersebut melalui pemberian makanan bergizi langsung di sekolah, yang tidak hanya meningkatkan status gizi anak, tetapi juga memperkuat kehadiran siswa, retensi pendidikan, dan pemerataan kesempatan belajar. Dalam jangka panjang, program ini memiliki potensi besar sebagai investasi sosial negara yang mendukung tumbuhnya generasi produktif dan kompetitif di tengah dinamika global.

Upaya memperbaiki kebijakan MBG perlu untuk dilakukan agar pelaksanaannya lebih baik lagi di masa yang akan datang yang diharapkan akan sejalan dengan tujuan yang telah disusun di tahap perencanaan kebijakan. Adapun upaya perbaikan kebijakan MBG antara lain meliputi perbaikan regulasi yang harus komprehensif, perbaikan pelaksanaan di lapangan, membangun sistem monitoring dan evaluasi yang jelas, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini penting dilakukan karena bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif pelaksanaan program MBG di SD. NEGERI No.122380, Jl. Kain Suji. Kec. Siantar Utara. Dan melihat seberapa penting peran Dinas Pendidikan di Kota Pematang Siantar dalam melakukan pengawasan pelaksanaan program MBG di Sekolah Dasar ini. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa MBG memberikan pengaruh yang baik terhadap status gizi anak, termasuk penurunan angka stunting serta peningkatan konsentrasi dan kehadiran siswa di sekolah. Program ini juga berkontribusi dalam meringankan beban ekonomi bagi keluarga dan memberdayakan pengusaha lokal. Namun dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti distribusi makanan yang tidak merata, kekurangan fasilitas di sekolah, dan perbedaan pemahaman tentang gizi di masyarakat. Evaluasi berkala,

pengembangan infrastruktur, pengawasan kualitas makanan, serta dukungan dari komunitas lokal diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program ini.

Berdasarkan penjelesaian diatas, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan SD Negeri No. 122380 Jl. Kain Suji?
2. Bagaimana mekanisme, bentuk, dan prosedur pengawasan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar dalam memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan di SD Negeri No. 122380 Jl. Kain Suji?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar dalam menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di SD. Negeri No.122380 Jl. Kain Suji, dan upaya Dinas Pendidikan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan SD Negeri No. 122380 Jl. Kain Suji.
2. Untuk menganalisis mekanisme, bentuk, serta prosedur pengawasan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar dalam memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan di SD Negeri No. 122380 Jl. Kain Suji.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar dalam menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG di SD Negeri No. 122380 Jl. Kain Suji.

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik melalui berbagai instrumen regulasi, program, atau strategi implementasi (Dunn, 2016). Menurut Thomas Dye (2017), kebijakan publik dapat diartikan sebagai "apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan", yang mencakup proses formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Menurut Weimer dan Vining (2017), kebijakan publik bersifat kompleks karena melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi internasional. Alaslan (2021) menyebutkan bahwa kebijakan publik yang menyentuh kepentingan masyarakat luas harus mempertimbangkan daya dukung sosial dan kesiapan infrastruktur, hal ini juga menjadi tantangan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis, terutama di daerah terpencil. Dalam konteks kebijakan sosial seperti Program Makan Bergizi Gratis, kebijakan publik berperan dalam memastikan akses yang adil terhadap sumber daya, seperti makanan bergizi bagi anak-anak sekolah untuk mendukung kesehatan dan pendidikan mereka.

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan sebagaimana di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Pemerintah Daerah. Jabatan tertinggi ada di Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas, dengan tugas menjamin terlaksannya proses pendidikan disekolah-sekolah yang ada diwilayah naungannya. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dibidang pengembangan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas. Kepala Dinas juga berhak memindahkan guru dan memberi teguran kepala bahawannya, hingga melakukan pemecatan. Kepala Dinas juga mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam kewenangan desentralisasi dibidang pendidikan dan tugas lain yang diberikan bupati.

Dinas Pendidikan adalah instansi yang bertugas untuk melaksanakan urusan pendidikan supaya terwujudnya pelayanan yang prima untuk menghasilkan tamatan yang berkualitas, bermanfaat, mandiri, dan bersaing. Di dalam lingkup Pendidikan terdiri dari perilaku pendidikan, materi Pendidikan, metode Pendidikan, properti Pendidikan, dasar dan tujuan Pendidikan. Di dalam lingkup tersebut memiliki anak didik sebagai objek dan tenaga pendidik sebagai subjek, serta untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang kondusif, lingkungan sekitar sangat berpengaruh.

“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan sebagai pengawas dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas di sekolah dasar, contohnya seperti sering mengadakan rapat evaluasi apa yang dibutuhkan oleh sekolah. Selanjutnya kewajiban sekolah yang belum dilaksanakan dengan baik yang seharusnya sekolah laksanakan mungkin akibat lalai ditegur langsung oleh dinas pendidikan, dipanggil dan dibuat rapat untuk dimintai keterangan dan dicari solusinya. lalu apabila ada dapodik sekolah yang bermasalah atau siswanya bermasalah tetap dipantau dan dibimbing oleh Dinas”. (Kamudin, S.Pd. Kasi kurikulum dan penilaian bidang pembinaan sekolah.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya, staf Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar akan membuat surat keluar sebagai bentuk aktivitas administrasi. Surat yang keluar dari Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar harus diketahui oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar dan surat yang keluar harus diberikan nomor dan kode surat melalui Subbagian Umum. Di dalam Sekretariat memiliki tiga Subbagian, yaitu Subbagian Keuangan, Subbagian Humas dan Subbagian Umum. Subbagian Umum merupakan kelompok kerja di sekretariat untuk melaksanakan kegiatan tata usaha, rumahtangga, arsip dan perpustakaan Dinas Pendidikan.

Teori Implementasi Kebijakan

Teori Behaviorisme pada dinas Pendidikan Penerapan teori behaviorisme dalam Pendidikan bertujuan untuk membentuk perilaku yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah bagaimana teori ini dapat diselaraskan dengan nilai-nilai moral dan etika dalam Pendidikan (Hamruni, 2021).

Teori Pengawasan MBG Teori implementasi kebijakan Pressman dan Wildavsky (1984) menjadi relevan untuk menganalisis pelaksanaan program MBG karena beberapa alasan teoretis dan praktis. Pertama, teori ini menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan tidak linear, melibatkan banyak aktor dengan kepentingan berbeda yang harus berkoordinasi secara efektif. Pressman dan Wildavsky (1984) mengintroduksi konsep "linkage" atau mata rantai implementasi, di mana semakin banyak aktor yang terlibat, semakin besar probabilitas terjadinya hambatan koordinasi. Dalam konteks MBG, program ini melibatkan multiple stakeholders mulai dari Kemendikbudristek, Kementerian Kesehatan, Dinas Pendidikan Kota, Dinas Kesehatan Kota, sekolah, penyedia makanan, hingga orang tua siswa. Kedua, teori ini menggarisbawahi pentingnya implementasi bertahap dan adaptasi.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih penulis karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam bagaimana peranan Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di lingkungan SD Negeri. 122380 JL. Kain Suji. Menurut Sugiono (2011:13-14) deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan variabel lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, Informan penelitian merupakan sumber utama atau pihak-pihak yang dijadikan peneliti sebagai narasumber yang memberikan data, informasi, dan penjelasan terkait fenomena yang diteliti. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian, sehingga informasi yang diberikan relevan dan dapat mendukung analisis penelitian. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang dihimpun dan diolah serta di analisis sendiri oleh peneliti / observer secara langsung dari objeknya. Sementara data sekunder, yaitu

data penelitian yang dihimpun dari bentuk data – data yang sudah jadi dalam berbagai bentuk karena telah diolah oleh orang lain (Nalom Siagian, 2021).

Keterangan/data/informasi yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Adapun tahapan – tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014: 246-252) yaitu :

1. Reduksi data Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal – hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal – hal yang penting, Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentranformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang sudah direduksi dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data yang tepat dan akurat.
2. Penyajian data Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam 42 penelitian ini peneliti telah berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada objek penelitian.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Pematangsiantar pada umumnya terhampar di dataran dengan ketinggian 400 m di atas permukaan laut. Kota Pematangsiantar terletak ditengah-tengah wilayah Kabupaten Simalungun. Karena terletak dekat garis khatulistiwa Kota Pematangsiantar tergolong kedalam daerah datar, beriklim sedang dengan suhu maksimal rata-rata 31,7°C dan suhu minimal rata-rata 20,7°C. Sumber Daya Alam baik yang terkandung di daratan, di sungai, berupa galian pasir dan air bawah tanah merupakan potensi ekonomi yang besar .ini berarti bahwa pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan efektif akan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat .

Peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat jelas akan memberikan dampak positif terhadap penyediaan dana dan fasilitas pendidikan sehingga pengembangan pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Di kota Pematangsiantar terdapat berbagai SDA, di antaranya yang menjadi andalan adalah: Pertanian, Perindustrian dan Jasa.

3.1. Peranan Dinas Pendidikan dalam Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Penyaksian dan Pengawasan Distribusi: Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar (seperti Muhammad Hamdani Lubis, SH) turun langsung menyaksikan penyaluran paket makanan bergizi kepada siswa-siswi di sekolah-sekolah untuk memastikan ketepatan sasaran. Seperti yang dikatakan oleh bapak juanda selaku bapak seksi pembinaan sd dan smp, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dinas Pendidikan yaitu sebagai monitoring atau meliputi pemantauan pelaksanaan program di sekolah, koordinasi dengan pihak sekolah, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program mbg memastikan apakah makanan yang diterima oleh siswa siswi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Adapun penjelasan lebih lengkapnya yaitu meliputi:

1. Rapat Satgas Pengawasan: Dinas Pendidikan terlibat dalam Rapat Satgas MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya untuk koordinasi pendampingan dan pengawasan teknis, terutama dalam pemenuhan persyaratan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

2. Pengawasan Kualitas dan Gizi: Bersama pihak sekolah (seperti wakil kepala sekolah bidang kesiswaan), Dinas Pendidikan memastikan menu yang disediakan memenuhi standar nutrisi dan higienitas yang ditetapkan.
3. Koneksi dengan Sekolah (Dapodik): Dinas Pendidikan memastikan data penerima manfaat (siswa) terintegrasi dengan baik untuk mempermudah distribusi melalui sistem Dapodik.
4. Monitoring di Lapangan: Pihak dinas memantau pelaksanaan makan bersama untuk memastikan makanan benar-benar dikonsumsi oleh siswa, bukan sekadar dibagikan.

3.2. Pelaksanaan Program Mbg Di Sekolah

Pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) di SD Negeri No.122380 Jl. Kain Suji merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan serta konsentrasi belajar siswa di lingkungan sekolah. Program ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain pihak sekolah, Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, serta pihak penyedia makanan yang telah ditunjuk untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Pelaksanaan program MBG di sekolah dilakukan secara terjadwal pada hari-hari tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak terkait. Makanan yang diberikan kepada siswa telah disesuaikan dengan standar gizi yang dianjurkan, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi siswa selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Dalam proses pelaksanaannya, pihak sekolah bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pembagian makanan kepada seluruh siswa. Guru dan staf sekolah turut berperan dalam mengawasi kegiatan pembagian makanan agar berjalan dengan tertib dan lancar. Selain itu, pihak sekolah juga memastikan bahwa makanan yang diterima oleh siswa dalam kondisi layak konsumsi dan memenuhi standar kebersihan. Program MBG biasanya dilaksanakan pada waktu istirahat atau setelah kegiatan belajar mengajar dimulai pada pagi hari. Siswa diarahkan untuk menerima makanan secara tertib sesuai dengan kelas masing-masing. Guru kelas bertugas untuk membantu mengatur pembagian makanan sekaligus memastikan bahwa seluruh siswa mendapatkan bagian yang sama. Selain itu, pihak sekolah juga melakukan pencatatan terhadap jumlah makanan yang diterima serta jumlah siswa yang mendapatkan manfaat dari program MBG. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan kepada pihak Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut.

Secara umum, pelaksanaan program MBG di SD Negeri No.122380 Jl. Kain Suji telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan aktif pihak sekolah dalam mendukung program tersebut serta antusiasme siswa dalam menerima makanan yang diberikan. Program ini diharapkan dapat terus berjalan secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesehatan dan perkembangan siswa.

3.3. Koordinasi Dinas Dan Sekolah

Koordinasi antara pihak sekolah dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan suatu program pendidikan di lingkungan sekolah. Dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa program dapat berjalan secara efektif, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak sekolah. Program ini mulai dilaksanakan secara nasional sejak Januari 2025 dan menysasar peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan guna mendukung kesehatan serta meningkatkan konsentrasi belajar siswa di sekolah.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi antara Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dan pihak sekolah, termasuk SD Negeri No.122380 Jl. Kain Suji, dilakukan melalui berbagai bentuk komunikasi dan kerja sama. Dinas Pendidikan berperan dalam memberikan arahan, pedoman pelaksanaan program, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya program di sekolah. Sementara itu, pihak sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembagian makanan bergizi kepada siswa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Melalui kegiatan ini, pihak Dinas Pendidikan dapat melihat secara langsung proses pelaksanaan program MBG di sekolah serta memberikan masukan apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Monitoring tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar gizi, kebersihan, dan kelayakan konsumsi.

Dalam praktiknya, pelaksanaan program MBG juga melibatkan pihak lain seperti penyedia makanan atau dapur umum yang bertugas menyiapkan dan mendistribusikan makanan kepada sekolah-sekolah penerima program. Menu makanan yang diberikan kepada siswa dirancang agar mengandung berbagai sumber gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral sehingga dapat membantu meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar siswa.

Koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah sangat diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya kerja sama yang baik antara kedua pihak tersebut, pelaksanaan Program MBG di sekolah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peserta didik, baik dalam meningkatkan kesehatan maupun dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah.

3.4. Kendala Pelaksanaan Program

1. Faktor Penghambat Pengawasan Program MBG

Meskipun terdapat berbagai faktor pendukung, pelaksanaan pengawasan terhadap program MBG juga menghadapi sejumlah hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan oleh Dinas Pendidikan.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pengawasan adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang bertugas melakukan pengawasan. Dengan jumlah sekolah yang cukup banyak, petugas pengawas dari Dinas Pendidikan sering kali mengalami keterbatasan dalam melakukan pemantauan secara rutin di seluruh sekolah.

Keterbatasan ini dapat menyebabkan pengawasan tidak dilakukan secara maksimal sehingga beberapa permasalahan di lapangan mungkin tidak terdeteksi dengan cepat.

3. Kendala Distribusi dan Logistik

seperti yang dikatakan bapak juanda panjaitan, Program MBG melibatkan proses distribusi makanan dari dapur SPPG ke berbagai sekolah. Dalam pelaksanaannya, proses distribusi ini dapat menghadapi berbagai kendala seperti keterlambatan pengiriman makanan, kondisi transportasi, maupun keterbatasan sarana distribusi.

Kendala logistik tersebut dapat mempengaruhi kualitas makanan yang diterima oleh siswa serta menyulitkan pihak pengawas dalam memastikan bahwa makanan yang diberikan masih dalam kondisi layak konsumsi.

4. Pengawasan Kualitas dan Keamanan Pangan

Dalam beberapa kasus di Indonesia, pelaksanaan program makan gratis pernah menghadapi permasalahan terkait kualitas makanan, bahkan terjadi kasus keracunan makanan akibat pengelolaan yang kurang optimal. Namun melalui hasil wawancara dengan bapak juanda, beliau mengatakan sejauh ini belum ada masalah keracunan pada sekolah yang menerima mbg di kota pematang siantar. Kalaupun ada yg mengeluh sakit perut itu bisa terjadi jika keterlambatan pengiriman mbg ke sekolah. Karena siswa siswi sudah terlebih dahulu merasakan kelaparan karna kurang tepat waktu dalam pengiriman makanan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap standar kebersihan, pengolahan makanan, serta distribusi menjadi sangat penting agar program MBG dapat berjalan dengan aman bagi siswa.

5. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Program

Kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pelaksanaan, standar gizi, maupun mekanisme pelaporan dapat menyebabkan pelaksanaan program tidak berjalan secara optimal.

3.5. Pengawasan Pelaksanaan Program MBG di SPPG

Dalam pelaksanaan suatu program, pengawasan menjadi salah satu aspek yang penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Husnaini (2008), pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilakukan di SPPG Jalan Cendana, diketahui bahwa pengawasan terhadap kegiatan di dapur dilakukan oleh pihak terkait yang datang langsung ke lokasi untuk melihat proses pelaksanaan kegiatan Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan.

4. PEMBAHASAN

4.1. Analisis Peran Dinas Pendidikan

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini mulai dilaksanakan secara nasional pada tahun 2025 dan menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Program tersebut dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional yang bertugas mengelola pemenuhan gizi bagi masyarakat, termasuk peserta didik di sekolah. Di Kota Pematangsiantar, program MBG mulai disalurkan pada tanggal 19 Mei 2025 kepada beberapa sekolah dari jenjang SD hingga SMK. Pada tahap awal, sebanyak 2.081 porsi makanan bergizi didistribusikan kepada siswa di beberapa sekolah penerima manfaat, termasuk SD Negeri No.122380 yang menerima sekitar 159 porsi makanan bergizi untuk para siswa.

Dalam konteks implementasi kebijakan, peran Dinas Pendidikan dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak sekolah di SD Negeri No.122380, diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar telah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah sebelum pelaksanaan program. Koordinasi tersebut dilakukan melalui sosialisasi mengenai mekanisme pelaksanaan program MBG, tata cara pendistribusian makanan, serta prosedur pelaporan kegiatan kepada pihak dinas.

Dari aspek komunikasi, Dinas Pendidikan berperan menyampaikan informasi mengenai tujuan dan mekanisme program kepada pihak sekolah agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan sekolah menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dari aspek sumber daya, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan penyedia makanan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendistribusikan makanan kepada siswa. Selain itu, guru dan tenaga kependidikan juga turut berperan dalam membantu proses pembagian makanan kepada siswa di sekolah. Dari aspek disposisi, pihak sekolah menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan program MBG. Hal ini terlihat dari dukungan kepala sekolah dan guru dalam membantu pelaksanaan pembagian makanan kepada siswa.

Sementara itu dari aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pendidikan, serta pihak sekolah. Struktur birokrasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa program dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan terawasi dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar memiliki peran penting dalam mengoordinasikan serta mengawasi pelaksanaan program MBG di lingkungan sekolah.

4.2. Efektivitas Program MBG

Efektivitas suatu program dapat dilihat dari sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks program MBG, tujuan utama program adalah meningkatkan asupan gizi peserta didik sehingga dapat mendukung kesehatan serta meningkatkan konsentrasi belajar siswa.

Pelaksanaan program MBG di Kota Pematangsiantar memberikan dampak positif bagi siswa, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi mereka selama mengikuti kegiatan belajar di

sekolah. Program ini juga diharapkan dapat membantu siswa untuk lebih fokus dalam mengikuti proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru di SD Negeri No.122380, diketahui bahwa siswa menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi terhadap program MBG. Siswa merasa senang karena mendapatkan makanan bergizi secara gratis di sekolah. Selain itu, program ini juga membantu siswa yang sebelumnya tidak membawa bekal dari rumah.

Berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri No.122380 Jl. Kain Suji dapat dianalisis melalui tiga faktor utama yaitu komunikasi yang jelas, dukungan sumber daya yang memadai, dan sikap positif dari para pelaksana program.

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Komunikasi yang baik akan memastikan bahwa informasi mengenai tujuan, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan program dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Menurut Edwards III, komunikasi yang efektif harus memenuhi tiga unsur yaitu kejelasan informasi, konsistensi pesan, serta penyampaian informasi yang tepat kepada pihak pelaksana.

Dalam pelaksanaan program MBG di SD Negeri No.122380 Jl. Kain Suji, komunikasi antara pihak Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dengan pihak sekolah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi sebelum program dilaksanakan. Melalui kegiatan tersebut, pihak sekolah diberikan penjelasan mengenai mekanisme pembagian makanan, jadwal pendistribusian, serta prosedur pelaporan pelaksanaan program kepada dinas terkait.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru di SD Negeri No.122380, diperoleh informasi bahwa pihak sekolah telah menerima arahan dari Dinas Pendidikan mengenai pelaksanaan program MBG. Informan menyampaikan bahwa:

“Pihak Dinas Pendidikan sebelumnya sudah memberikan penjelasan kepada sekolah mengenai pelaksanaan program makan bergizi gratis, termasuk cara pembagian makanan kepada siswa serta bagaimana pelaporan kegiatan kepada dinas.” (Hasil wawancara dengan guru SD Negeri No.122380, tahun 2025).

Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah telah dilakukan dengan cukup baik sehingga pihak sekolah memahami perannya dalam pelaksanaan program MBG.

2. Faktor Dukungan Sumber Daya

Selain komunikasi, faktor sumber daya juga sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, fasilitas, serta dukungan logistik yang diperlukan dalam pelaksanaan program.

Dalam pelaksanaan program MBG di SD Negeri No.122380, sumber daya manusia yang terlibat antara lain kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan yang membantu dalam proses pembagian makanan kepada siswa. Selain itu, pihak penyedia makanan juga berperan dalam menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi kepada sekolah penerima program.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak sekolah, diketahui bahwa guru-guru turut membantu dalam proses pembagian makanan kepada siswa agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Salah satu informan menyampaikan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program ini, guru-guru juga ikut membantu mengatur siswa saat pembagian makanan agar prosesnya berjalan tertib dan semua siswa bisa mendapatkan makanan.” (Hasil wawancara dengan pihak sekolah SD Negeri No.122380, tahun 2025).

Selain dukungan sumber daya manusia, keberadaan fasilitas seperti tempat pembagian makanan dan sarana pendukung lainnya juga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program MBG di sekolah.

3. Faktor Sikap atau Disposisi Pelaksana Program

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi atau sikap dari para pelaksana program. Disposisi berkaitan dengan komitmen, dukungan, serta kesediaan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan program MBG di SD Negeri No.122380, sikap pelaksana program menunjukkan respon yang positif terhadap kebijakan tersebut. Pihak sekolah mendukung pelaksanaan program karena dinilai dapat memberikan manfaat bagi siswa, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi mereka selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak sekolah, diketahui bahwa program MBG mendapatkan respon yang baik dari guru maupun siswa. Salah satu informan menyampaikan bahwa: "Program ini sangat membantu siswa, terutama bagi siswa yang tidak sempat membawa bekal dari rumah. Anak-anak juga terlihat senang ketika mendapatkan makanan dari program ini." (Hasil wawancara dengan guru SD Negeri No.122380, tahun 2025).

Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap positif dari para pelaksana program di sekolah menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program MBG. Dengan demikian, jika dianalisis berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, pelaksanaan program MBG di SD Negeri No.122380 Jl. Kain Suji dipengaruhi oleh faktor komunikasi yang cukup jelas antara pemerintah daerah dan pihak sekolah, dukungan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan program, serta sikap positif dari para pelaksana program yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pihak sekolah, program MBG di SD Negeri No.122380 dapat berjalan dengan cukup baik dan memberikan manfaat bagi siswa.

4.3. Analisis Kendala Pengawasan

Meskipun program MBG memiliki tujuan yang baik, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan secara langsung di setiap sekolah penerima program. Dinas Pendidikan harus mengawasi banyak sekolah sekaligus sehingga pengawasan tidak selalu dapat dilakukan secara intensif di setiap sekolah. Selain itu, kendala lain yang muncul berkaitan dengan proses distribusi makanan dari dapur penyedia makanan menuju sekolah. Dalam beberapa kasus, keterlambatan distribusi makanan dapat mempengaruhi jadwal pembagian makanan kepada siswa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah di SD Negeri No.122380, kendala lain yang muncul adalah keterbatasan fasilitas pendukung seperti tempat penyimpanan makanan dan alat makan bagi siswa. Hal ini dapat mempengaruhi kelancaran proses pembagian makanan di sekolah.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, kendala tersebut berkaitan dengan faktor sumber daya dan struktur birokrasi yang belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pelaksanaan program di lapangan.

4.4. Upaya Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program MBG, diperlukan upaya yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan pihak sekolah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dengan pihak sekolah serta penyedia makanan. Koordinasi yang baik akan membantu memastikan bahwa proses distribusi makanan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program MBG di sekolah. Monitoring tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak sekolah, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pencatatan jumlah makanan yang diterima serta melaporkan pelaksanaan

program kepada Dinas Pendidikan secara berkala. Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pelaksanaan program di masa mendatang.

Apabila dilihat dari teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, upaya tersebut berkaitan dengan peningkatan komunikasi, penguatan sumber daya, serta perbaikan koordinasi dalam struktur birokrasi agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif. Dengan adanya upaya perbaikan tersebut, diharapkan pelaksanaan program MBG di SD Negeri No.122380 dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta didik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar dalam Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lingkungan Sekolah SD Negeri No.122380 Jalan Kain Suji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri No. 122380 Kota Pematang Siantar, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar memiliki peran penting dalam mendukung implementasi Program tersebut. Peran tersebut terlihat melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di lingkungan sekolah. Dinas Pendidikan juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyedia makanan, serta pihak sekolah dalam memastikan bahwa program dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program MBG di SD Negeri No.122380 Jl.Kain Suji dapat di analisis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III yang menekankan empat variabel utama yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dari aspek Komunikasi, Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak sekolah sebelum pelaksanaan program MBG. Dari aspek sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh keterlibatan kepada sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta pihak penyedia makanan yang membantu proses pendistribusian makanan kepada siswa. Selain itu, dari aspek disposisi atau sikap pelaksana program, pihak sekolah menunjukkan sikap yang positif dan mendukung terhadap pelaksanaan program karena dinilai memberikan manfaat bagi siswa. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pendidikan, serta pihak sekolah sehingga program dapat berjalan secara terkoordinasi.
3. Secara umum pelaksanaan program MBG di SD Negeri No.122380 dapat dikatakan berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif bagi siswa, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi serta meningkatkan antusiasisme siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Program ini juga memberikan manfaat bagi siswa yang sebelumnya tidak membawa bekal dari rumah sehingga kebutuhan gizi mereka selama mengikuti kegiatan belajar dapat terpenuhi dengan lebih baik.
4. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan secara langsung di setiap sekolah penerima program, keterlambatan distribusi makanan dari dapur penyedia makanan menuju sekolah, serta keterbatasan fasilitas pendukung di sekolah seperti tempat penyimpanan makanan dan alat makan bagi siswa. Selain itu, pelaksanaan program MBG di Kota Pematang Siantar juga masih belum merata karena belum seluruh sekolah dapat menerima manfaat dari program tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi serta proses pembangunan fasilitas pendukung yang masih berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan penyaluran program MBG masih terbatas pada beberapa sekolah dan belum sepenuhnya menjangkau sekolah-sekolah lain, terutama yang berada di wilayah yang lebih jauh atau terpencil.
5. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya perbaikan yang melibatkan berbagai pihak, antara lain dengan meningkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, pihak sekolah, serta penyedia makanan agar proses distribusi makanan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan

untuk memastikan bahwa pelaksanaan program MBG berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta memenuhi standar gizi dan keamanan pangan. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan serta pengoperasian SPPG agar penyaluran program MBG dapat menjangkau lebih banyak sekolah secara merata. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Pematang Siantar dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi peningkatan Kesehatan dan kualitas belajar peserta didik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan program MBG, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, Dinas Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah penerima manfaat. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan serta pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar program MBG dapat menjangkau lebih banyak sekolah secara merata, termasuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah yang lebih jauh atau terpencil.
2. Bagi pihak sekolah
Pihak sekolah diharapkan dapat terus mendukung pelaksanaan program MBG dengan mengelola proses pembagian makanan secara tertib dan terorganisir. Selain itu, sekolah juga diharapkan dapat meningkatkan fasilitas pendukung seperti tempat penyimpanan makanan serta sarana pendukung lainnya agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan nyaman bagi siswa.
3. Bagi Penyedia Makanan atau SPPG
Penyedia makanan diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu dalam proses pendistribusian makanan ke sekolah serta memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada siswa telah memenuhi standar gizi dan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada satu sekolah penerima program MBG. Oleh karena itu, Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak sekolah sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program MBG di Kota Pematang Siantar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faida, R. (2021). Parenting dan gizi anak: Menciptakan lingkungan mendukung pertumbuhan. *Jurnal Ilmu Kesehatan Anak*, 5(2), 45-53.
- Al Jawad, U. A., Nur, I., Rasyid, M. R., Hasyim, M. F., & Sidiek, M. (2024). Teori pendidikan dan implikasinya terhadap pembelajaran dan pengajaran. (Nama Jurnal jika ada), 1(4)
- Badan Pangan Nasional/National Food Agency. (2025, October 3). Program MBG terus Jalan, Badan Pangan Nasional dukung terbentuknya ekosistem pangan ideal dan pengawasan PSAT [Siaran pers No. 390/R-NFA/X/2025]. <https://www.nfa.go.id>
- Desiani, L., & Syafiq, M. (2025). Standar gizi dan implementasi program makan bergizi gratis. *Jurnal Nutrisi dan Kesehatan*, 12(1), 23-35.
- Dian Herdiana. (2025, March). Faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan MBG di berbagai daerah. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*. 9(1), 56-68.
- FAO, UNICEF, & WHO. (2023). Nutrition and food security report 2023. Food and Agriculture Organization.
- Furkan, L M., Sari, R. A., Eliza, M. F., Nofrizal, D., Junva, F., Gistituati, N., & Anisah, A. (2025). Mewujudkan makan bergizi gratis. Perspektif guru SD dalam implementasi kebijakan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(3), 678. <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i3.678>

- Harsono, T. (2025). Target penerima manfaat program MBG tahun 2025. *Jurnal Gizi Nasional*, 7(1), 10-15.
- Ikka Febryanti, I., Indiati, I., Muhammad Alwiadi Pane, M. A., & Pudji Astuti, P. (2025). Implementasi kebijakan makan bergizi gratis (MBG): Studi kasus pada SDN 3 Kepanjen Kabupaten Malang. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, <https://doi.org/10.14710/dialogue.v7i1.26628> 7(1), 67-79.
- Kemdikbud R1. (2025). Laporan gizi dan kesehatan anak Indonesia. Jakarta: Kemdikbud R1.
- Merlinda, & Yusmar Yusuf. (2025a). Program MBG dan pemberdayaan UMKM lokal: Dampak sosial ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 8(2), 101-115.
- Naibaho, T. (2023). Perilaku belajar anak usia 3-6 tahun. *Jurnal Pendidikan Anak*, 6(1), 22-30.
- Nissa, A. K., Candra, M., Humairoh, T., & Gusyuliandari, S. (2025). Kebijakan Makanan Bergizi Gratis: Analisis ekonomi politik dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus SMP Negeri 4 Tanjungpinang). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11), 33-37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15521260>
- Nurwakhid, M. A., & Fridiyanti, Y. N. (2025). Analisis efektivitas program makan siang gratis terhadap gizi anak dan stunting di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15839164> 3(1), 314-324.
- Pematangsiantar, Sinata.id. (2025). Realisasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pematangsiantar. <https://www.sinata.id>
- Pri Mulyono, P., & Titik Haryati, T. (2023). Konsep dan penerapan fungsi manajemen pendidikan. *Jurnal Pendidikan Terintegrasi*, 4(1), 82-91.
- Purwowidhu, A. (2025). Kebijakan gizi dan pendidikan dasar. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 11(2), 50-63.
- Rahayu, T. (2019). Karakteristik siswa sekolah dasar dan implikasinya terhadap pembelajaran. *Misbahul Ulum (Jurnal)* <https://doi.org/10.70688/misbahululum.v1i02%20Desember.7> Institusi). 1(2).
- Sarjito, D. (2025). Peran gizi dalam pembangunan kualitas SDM anak. *Jurnal Kesejahteraan Anak*, 4(1), 12-25.
- Sazy Yulia Widyasari, S., Larasati, A., & Alam, W. Y. (2025). Evaluasi kebijakan makan bergizi gratis di sekolah dasar: Implikasi terhadap kesehatan anak dan pemberdayaan ekonomi lokal. *INNOVATIVE: Journal of Social* <https://j-Science> Research, 5(4), innovative.org/index.php/Innovative 1727-1736.
- Siagian Nalom, (2021), *Statistika Dasar: Konseptualisasi Dan Aplikasi*, ISBN: 978-623-378-086-5, Percetakan CV Kultura Digital Media, Surakarta, Cetakan pertama.
- Sinata.id. (2025, September 17). Program MBG di 6 sekolah Kota Pematangsiantar. <https://www.sinata.id>
- Tomita, H. (2021). Free school lunch program in Japan: Effects on attendance and academic performance. *International Journal of Educational Policy*, 14(3), 200-212.
- Wina Sanjaya. (2008). Strategi pembelajaran inovatif. Jakarta: Kencana.
- Zulrahman. (n.d.). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Virlana, B., & Tjonon, A. (2025). Kepastian hukum program makan bergizi gratis: Kajian atas usulan pemanfaatan dana zakat. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 57-82. <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v11i1.978>
- UNESCO. (2025). Education: UNESCO calls for better quality school meals. UNESCO. <https://www.unesco.org>
- Agustini, Ucu. 2024. "Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Kiprah Pendidikan*, Vol. 4 No. 3, hlm. 362–368.

- Ariani, Fifi & Rahim, Revita. 2025. "Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis." *Jurnal Analis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*.
- Badan Gizi Nasional. 2024. *Pedoman Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)*. Jakarta: Badan Gizi Nasional.
- Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar. 2024. *Kota Pematangsiantar Dalam Angka*. Pematangsiantar: BPS Kota Pematangsiantar.
- Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar. 2025. *Profil Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar*. Pematangsiantar: Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Hastuti, Rela., Mahardika, Agustin., & Hariyadi. 2025. "Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah (Literature Review)." *Pro Health: Jurnal Ilmiah Kesehatan*.
- Herniati, Najwa & Idawati. 2025. "Efektivitas Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis terhadap Minat Belajar Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan AURA*, Vol. 6 No. 1, hlm. 88–98.
- Husnaini, Usman. 2008. *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mistar.id. 2026. "Belum Semua Sekolah di Pematangsiantar Terima Program Makan Bergizi Gratis." Diakses dari <https://mistar.id> pada tanggal 10 Januari 2026.
- Putri, Amelia Bactiara., Fahriyah, Ulyatul., Putri, Ratna Yuliana., Muhtarom, Syifa., Taibah, Qonitatin., Sutiana, Putri Suci Ramadhani., & Afandi, Rifki. 2025. "Pengaruh Program Makan Bergizi Gratis terhadap Minat Belajar Siswa Sekolah Dasar." *Edukasi Elita: Jurnal Inovasi Pendidikan*.
- Rahmiwati, Anita., Febry, Fatmalina., & Sunarsih, Elvi. 2025. "Peningkatan Pengetahuan Gizi Siswa Penerima Program Makan Bergizi Gratis melalui Edukasi Berbasis Traffic Light Nutrition Card." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*.
- Reza, Izzul Fatchu. 2025. "Urgensi Penjaminan Mutu dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis." *Jurnal Analis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*.
- Saniyah, Nenden Dalfa Zakiyah., Safitri, Ananda Michel., Atmawijaya, Syabilla Putri., Alislami, Sultan Alawuddin., Salwa, Syifaus., & Suhardi. 2024. "Analisis Kritis terhadap Efektivitas Kebijakan Makanan Bergizi Gratis di Sekolah: Antara Upaya Gizi dan Tantangan Tata Kelola." *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- SD Negeri 122380 Pematangsiantar. 2025. *Profil UPTD SD Negeri 122380 Jalan Kain Suji*. Pematangsiantar: UPTD SD Negeri 122380.
- Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 2025. *Profil SPPG / Dapur Program Makan Bergizi Gratis Jalan Cendana No.4 Kelurahan Kahean Kota Pematangsiantar*. Pematangsiantar.
- Pemerintah Kota Pematangsiantar. 2024. *Profil Kota Pematangsiantar*. Pematangsiantar: Pemerintah Kota Pematangsiantar.